

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

**HASIL PENYELARASAN**

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

**INSPEKTORAT KABUPATEN BANJARNEGARA**

**TAHUN 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 dapat diselesaikan. Rencana Kerja Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan oleh Inspektur.

Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan salah satu kewajiban Inspektorat dalam merencanakan sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2024. Selain itu Rencana Kerja Inspektorat dipakai sebagai pedoman dan pengendali yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam menyusun Rencana Kerja dan semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

di Banjarnegara  
pada tanggal : Januari 2024

INSPEKTUR  
KABUPATEN BANJARNEGARA

**Drs. AGUNG YUSIANTO, M.Si.,CGCAE.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19720811 199203 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II   HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Banjarnegara .....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara.....	24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banjarnegara .....	29
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	45
2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD .....	45
BAB III   TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	46
3.1. Telaahan Terhadap Arah Kebijakan Nasional .....	46
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	48
3.3. Program dan Kegiatan .....	48
BAB IV   RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	53
BAB V    PENUTUP .....	60

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim

penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

## 1.2. Landasan Hukum

Renja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);

25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegar Tahun 2022 Nomor 14).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;

- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

**BAB 1 : PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

**BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

**BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

**BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

## **BAB 5 : PENUTUP**

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara. Urusan yang menjadi kewenangan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara yaitu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.

Renja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 3 program, 10 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 5.989.039.505,00 dengan fokus utama pada capaian Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi dan BPK RI serta Peningkatan Kapabilitas APIP. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pengawasan daerah yang meliputi:

1. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang masih belum terintegrasi dan belum menjadi bagian dalam pelaksanaan tata kelola organisasi perangkat daerah;
2. Cakupan pengawasan yang luas dengan berbagai penugasan mandatori yang memerlukan langkah audit yang tepat dan cepat;
3. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan;

4. Terbatasnya jumlah SDM pemeriksa dan kurangnya kompetensi SDM pemeriksa;

Dari 3 program, 10 kegiatan, dan 26 sub kegiatan yang dalam Renja Inspektorat tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun anggaran 2022 terdiri dari 3 program, 10 kegiatan, dan 26 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 5.989.039.505,-

Pada Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan penambahan dan pengurangan anggaran sub kegiatan yang menjadikan penurunan pagu. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 3 program, 10 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 5.897.220.956,00. Pada Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara tahun 2022, rincian belanja pada program/kegiatan/subkegiatan yang bertambah berupa belanja Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi, penyediaan bahan logistik kantor, pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pengawasan internal penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, sedangkan yang berkurang berupa belanja administrasi keuangan perangkat daerah. Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target.

Sesuai dengan perhitungan target dan realisasi atas program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2022 yang direncanakan seluruhnya telah terpenuhi. Adapun realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, Pendampingan Asistensi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Efisiensi dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sebagai yang merupakan kegiatan utama pengawasan dan pendukung kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung terlaksananya kepatuhan obyek pengawasan dalam memenuhi tindak lanjut hasil pengawasan;
3. Optimalisasi sumber daya manusia APIP dan sarana prasarana pendukung pada kegiatan pengawasan;
4. Meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan publik.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka untuk mengoptimalkan capaian kinerja indikator Inspektorat Kabupaten Banjarnegara diperlukan strategi dan langkah-

langkah yang perlu dilaksanakan. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Penyelenggaraan pengawasan intern dalam bentuk *assurance* dan *consulting* yang diselenggarakan secara efektif dan memiliki nilai tambah bagi obyek pengawasan;
2. Mengintensifkan upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam bentuk pendampingan/fasilitasi/asistensi;
3. Pemantapan sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas APIP yaitu Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
4. Menyusun dan menyempurnakan kebijakan, pedoman dan prosedur yang disesuaikan dengan standar audit AAIP;
5. Menyusun rencana pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pengawasan;
6. Mengoptimalkan Peran APIP dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan urusan pengawasan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Banjarnegara sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah**  
**s.d. Tahun 2023\* Inspektorat Kabupaten Banjarnegara**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
<b>6</b>	<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>									
<b>6.01</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>									
<b>6.01.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terpenuhinya unsur kapabilitas APIP</b>		<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>			
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja, keuangan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan		14 laporan	70 laporan	70 laporan	100 %			
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan		47 orang	47 orang	47 orang	100 %			
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelatihan dan pengiriman peserta diklat pengawasan bagi aparatur pengawas		5 kali	25 kali	25 kali	100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bahan dukungan administrasi umum perangkat daerah terpenuhi		9 paket	45 paket	45 paket	100 %			
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan peralatan Gedung kantor		1 unit	4 unti	4 unti	100%			
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa administrasi perkantoran yang terbayarkan		3 paket dan 7 orang THL	15 paket dan 7 orang THL	15 paket dan 7 orang THL	100 %			
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara		7 unit dan 10 paket	7 unit dan 10 paket	7 unit dan 10 paket	100 %			
<b>6.01.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inskab, Insprov, BPK RI</b>		<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>			
6.01.02.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan		98 laporan	618 laporan	618 laporan	100 %			
6.01.02.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kasus/pengaduan di lingkungan Pemda yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus dan atau klarifikasi		16 laporan	106 laporan	106 laporan	100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
<b>6.01.03</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Persentase terpenuhinya unsur Kapabilitas APIP</b>		<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>			
6.01.03.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan teknis di bidang Pengawasan		3 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100 %			
6.01.03.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pengawasan		11 laporan	55 laporan	55 laporan	100 %			
<b>6</b>	<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>									
<b>6.01</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>									
<b>6.01.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	79,30					79,25	79,25	100%
6.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya informasi perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%					100%	100%	100%
6.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8					8	8	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
6.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6					6	6	100%
6.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%					100%	100%	100%
6.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	43					43	43	100%
6.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	30					30	30	100%
6.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4					4	4	100%
6.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%					100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
6.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	25					25	25	100%
6.01.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan	100					100	100	100%
6.01.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	40					40	40	100%
<b>6.01.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat</b>	85					84,34	84,34	100%
6.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100%					100%	100%	100%
6.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8					8	8	100%
6.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%					100%	100%	100%
6.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	10					50	50	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
6.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6					20	20	100%
6.01.01.2.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1					1	1	100%
6.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinyajasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%					100%	100%	100%
6.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12					12	12	100%
6.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12					12	12	100%
6.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100%					100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
6.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1					1	1	100%
6.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5					5	5	100%
6.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1					1	1	100%
6.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	8					8	8	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2					-	-	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1					-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1					-	-	-
<b>6.01.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan eksterne</b> - <b>Inskab</b> - <b>Insprov</b> - <b>BPK RI</b>	90,5% 96% 94%					90% 95% 94%	90% 95% 94%	100%
		Persentase hasil pengawasan sesuai bidang pengawasan yang diselesaikan tepat waktu	75%					70%	70%	100%
6.01.02.2.01	Kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal	Jumlah laporan hasil pengawasan Internal	102					99	99	100%
		Jumlah LHP yang terbit tepat waktu	77					69	69	100%
6.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	8					8	8	100%
6.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pengawasan keuangan pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	9					9	9	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
6.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Reviu laporan kinerja	Jumlah laporan hasil reviu kinerja	45					45	45	100%
6.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan Reviu laporan keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	2					2	2	100%
6.01.02.2.01.05	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah hasil laporan pengawasan desa	30					28	28	100%
6.01.02.2.01.07	Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, dan tindak lanjut pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monev tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	2					2	2	100%
	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1					-	-	-
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan informasi hasil pengawasan	12					12	12	100%
		Jumlah obyek pemeriksaan yang menindaklanjuti hasil pengawasan	95					92	92	100%
6.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	18					16	16	100%
6.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	Jumlah laporan Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	6					6	6	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
6.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	12					10	10	100%
<b>6.01.03</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Level Kapabilitas APIP</b>	3					3	3	100%
		<b>Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Level Maturitas SPIP terdefinisi</b>	33,3%					16,7%	16,7%	100%
6.01.03.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan teknis bidang Pengawasan dan fasilitasi pengawasan	3					3	3	100%
6.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengawasan	Jumlah rekomendasi Kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	3					3	3	100%
6.01.03.2.02	Kegiatan Pendampingan dan asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan integritas	44					44	44	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
6.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	44					44	44	100%
6.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	44					44	44	100%
6.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pendampingan, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	3					3	3	100%
6.01.03.2.02.04	Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	44					44	44	100%

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Inspektorat Kabupaten Banjarnegara mengampu 5 Indikator. Dari 5 indikator tersebut, semuanya berstatus tercapai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain :

1. Peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan audit intern dalam rangka memberikan jaminan (*quality assurance*) atas tata kelola pemerintahan daerah;
2. Fasilitasi dan pendampingan peningkatan maturitas SPIP;
3. Peningkatan Kapabilitas APIP dengan menerapkan pemeriksaan sesuai pelaksanaan penugasan berdasarkan standar dan kode etik audit serta implementasi kendali mutu pelaksanaan audit;
4. Penyusunan pedoman pengawasan yang digunakan sebagai arah dan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat;
5. Membangun layanan konsultasi dalam bentuk asistensi pendampingan guna memberikan *insight* berupa pengetahuan dan keyakinan dalam pelaksanaan tata kelola perangkat daerah.

Dalam rangka mendorong faktor-faktor keberhasilan tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi :

1. Pelaksanaan kegiatan pengawasan intern secara berkala dengan menggunakan metode dan pendekatan sesuai dengan jenis pengawasannya sehingga diperoleh simpulan dan rekomendasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi obyek pengawasan;

2. Mengintensifkan penyelesaian tindak lanjut melalui rapat koordinasi pengawasan dan pendampingan baik melalui tatap muka maupun secara *online* dan mendorong auditor untuk proaktif dalam penyelesaian tindak lanjut;
3. Pendampingan kepada perangkat daerah dalam meningkatkan pengendalian intern melalui evaluasi atas dokumen rencana tindak pengendalian SPIP;
4. Peningkatan kompetensi dan pengetahuan SDM APIP;
5. Penyusunan Kebijakan Pengawasan (Jakwas) dan Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
6. Melakukan inovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, pelayanan konsultasi dan pengaduan serta menyempurnakan standar operasional prosedur.

Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara**  
**TAHUN 2021-2022**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan :	-	IKK									
	a. Inskab,			90%	90%			90%	90%	90%		
	b. Insprov			98%	98%			98%	98%	98%		
	c. BPK RI			80%	80%			80%	80%	80%		
2	Maturitas SPIP	-	IKK	3	3			3	3	3		
3	Level kapabilitas APIP	-	IKK	2	2			2	2	2		
4	Nilai SAKIP OPD	-	IKK	63	65			62	63	65		
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	-	IKK	77	80			78,58	80,173	83,56		

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara**  
**TAHUN 2023-2024**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan :	-	IKK					
	a. Inskab,			90%	90,5%	90%	90,5%	
	b. Insprov			95%	96%	95%	96%	
	c. BPK RI			94%	94%	94%	94%	
2.	Level kapabilitas APIP	-	IKK	3	3	2	3	

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banjarnegara

Inspektorat Kabupaten Banjarnegara dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 1 urusan, yaitu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjarnegara untuk tahun 2023 mencakup 1 (satu) urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjarnegara diantaranya adalah:

1. Belum maksimalnya pemenuhan level Kapabilitas APIP terutama dalam pelaksanaan audit kinerja pada OPD yang mendukung capaian visi dan misi kepala daerah;
2. Jumlah penugasan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan jumlah aparatur pengawasan yang ada saat ini;
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dilaksanakan secara memadai oleh Kepala OPD, sehingga menjadi salah satu faktor yang menghambat terwujudnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Belum optimalnya pencapaian realisasi kesesuaian pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
2. Adanya keterlambatan penyelesaian laporan hasil pengawasan;
3. Terdapat perbedaan persepsi implementasi kebijakan antara aparat pengawas dengan obyek pemeriksaan (obrik).

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, yaitu:

1. APIP yang saat ini dituntut harus mampu berperan sebagai *trusted advisory* yang merupakan implikasi pergeseran peran Inspektorat dari *watchdog* menjadi peran katalis yang harus dapat menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting partner*);
2. Atas tuntutan tersebut maka diperlukan APIP yang memiliki kompetensi dan sikap professional dalam melaksanakan tugas selain tentunya didukung dengan peningkatan jumlah personil;
3. Tingkat maturitas SPIP dan Level Kapabilitas APIP masih berada pada level 2;
4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh obyek pemeriksaan harus ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari setelah laporan diterima;
5. Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi;
6. Pengukuran kinerja secara terintegrasi merupakan bagian dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2023. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
2. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terkendala dengan masih belum tersusun dan terlaksananya Manajemen Risiko Pemerintah Daerah secara memadai;
3. Belum optimalnya peran APIP yang disebabkan kurangnya kompetensi dan terbatasnya jumlah SDM APIP;
4. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung peningkatan kualitas pengawasan.

#### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPD Tahun 2023-2026. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 meliputi:

1. Mendorong kepatuhan OPD terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
2. Peningkatan penerapan SPIP;
3. Mewujudkan peran APIP yang efektif;
4. Mengawal peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi;
5. Menyederhanakan prosedur layanan publik, dan meningkatkan pelayanan yang tertib dengan berbasis teknologi informasi.

**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Banjarnegara**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>				<b>10.126.000.000</b>	<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>				<b>10.126.000.000</b>	
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Inspektorat Kabupaten Banjarnegara</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>79,99 Nilai</b>	<b>7.822.000.000</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Inspektorat Kabupaten Banjarnegara</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>79,99 Nilai</b>	<b>7.822.000.000</b>	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Persentase terpenuhinya informasi perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	12.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Persentase terpenuhinya informasi perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	12.000.000	
1)	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen	6.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen	6.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2)	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan	6.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan	6.000.000	
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.785.000.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.785.000.000	
1)	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	43 Orang /bulan	5.710.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	43 Orang /bulan	5.710.000.000	
2)	Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	30 Dokumen	69.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	30 Dokumen	69.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pengujian/verifikasi keuangan SKPD					pengujian/verifikasi keuangan SKPD					
3)	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4 Laporan	6.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4 Laporan	6.000.000	
3.	Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	555.000.000	Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	555.000.000	
1)	Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	25 Orang	500.000.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	25 Orang	500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2)	Sub Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan	100 Orang	35.000.000	Sub Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan	100 Orang	35.000.000	
3)	Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	40 Orang	20.000.000	Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	40 Orang	20.000.000	
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat</b>	85 Nilai	-	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat</b>	85 Nilai	-	
4.	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100%	500.000.000	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100%	500.000.000	
1)	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 Paket	500.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 Paket	500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	300.000.000	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	300.000.000	
1)	Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah paket mebel yang disediakan	10 Unit	100.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah paket mebel yang disediakan	10 Unit	100.000.000	
2)	Sub Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 Unit	200.000.000	Sub Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 Unit	200.000.000	
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	210.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	210.000.000	
1)	Sub Kegiatan Penyediaan jasa	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber	12 Laporan	60.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber	12 Laporan	60.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	komunikasi, sumber daya air dan listrik		daya air dan listrik yang disediakan			komunikasi, sumber daya air dan listrik		daya air dan listrik yang disediakan			
2)	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	150.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	150.000.000	
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100%	460.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100%	460.000.000	
1)	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	42.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	42.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2)	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 unit	143.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 unit	143.000.000	
3)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	
4)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	8 Unit	75.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	8 Unit	75.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Inspektorat Kabupaten Banjarnegara</b>	<b>Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ektern</b> - Inskab - Insprov - BPK RI	90,5% 96% 94%	1.678.000.000	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Inspektorat Kabupaten Banjarnegara</b>	<b>Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ektern</b> - Inskab - Insprov - BPK RI	90,5% 96% 94%	1.678.000.000	
		Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Persentase hasil pengawasan sesuai bidang pengawasan yang diselesaikan tepat waktu	75%	-		Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Persentase hasil pengawasan sesuai bidang pengawasan yang diselesaikan tepat waktu	75%	-	
8.	Kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan hasil pengawasan Internal	102 Laporan	1.458.000.000	Kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan hasil pengawasan Internal	102 Laporan	1.458.000.000	
		Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah LHP yang terbit tepat waktu	77 Laporan	-		Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah LHP yang terbit tepat waktu	77 Laporan	-	
1)	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	8 Laporan	92.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	8 Laporan	92.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2)	Sub Kegiatan Pengawasan keuangan pemerintah daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	9 Laporan	187.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan keuangan pemerintah daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	9 Laporan	187.000.000	
3)	Sub Kegiatan Reviu laporan kinerja	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan hasil reviu kinerja	45 Laporan	125.000.000	Sub Kegiatan Reviu laporan kinerja	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan hasil reviu kinerja	45 Laporan	125.000.000	
4)	Sub Kegiatan Reviu laporan keuangan	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	2 Laporan	25.000.000	Sub Kegiatan Reviu laporan keuangan	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	2 Laporan	25.000.000	
5)	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah hasil laporan pengawasan desa	30 Laporan	179.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah hasil laporan pengawasan desa	30 Laporan	179.000.000	
6)	Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, dan tindak lanjut pemeriksaan APIP	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah dokumen hasil monev tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	2 Dokumen	850.000.000	Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, dan tindak lanjut pemeriksaan APIP	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah dokumen hasil monev tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	2 Dokumen	850.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	18 Laporan	220.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	18 Laporan	220.000.000	
1)	Sub Kegiatan Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan Penanganan penyelesaian kerugian negara/ daerah	6 Laporan	54.000.000	Sub Kegiatan Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan Penanganan penyelesaian kerugian negara/ daerah	6 Laporan	54.000.000	
2)	Sub Kegiatan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	12 Laporan	166.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	12 Laporan	166.000.000	
<b>III</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Inspektorat Kabupaten Banjarnegara</b>	<b>Level Kapabilitas APIP</b>	<b>3 Kegiatan</b>	<b>626.000.000</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Inspektorat Kabupaten Banjarnegara</b>	<b>Level Kapabilitas APIP</b>	<b>3 Kegiatan</b>	<b>626.000.000</b>	
		<b>Inspektorat Kabupaten Banjarnegara</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Level Maturitas SPIP terdefinisi</b>	<b>33,3%</b>	<b>-</b>		<b>Inspektorat Kabupaten Banjarnegara</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Level Maturitas SPIP terdefinisi</b>	<b>33,3%</b>	<b>-</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah dokumen kebijakan teknis bidang Pengawasan dan fasilitasi pengawasan	3 Dokumen	29.000.000	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah dokumen kebijakan teknis bidang Pengawasan dan fasilitasi pengawasan	3 Dokumen	29.000.000	
1)	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengawasan	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah rekomendasi Kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	3 Rekomendasi	29.000.000	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengawasan	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah rekomendasi Kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	3 Rekomendasi	29.000.000	
11	Kegiatan Pendampingan dan asistensi	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan integritas	44 OPD	597.000.000	Kegiatan Pendampingan dan asistensi	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan integritas	44 OPD	597.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1)	Sub Kegiatan Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	44 OPD	145.000.000	Sub Kegiatan Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	44 OPD	145.000.000	
2)	Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	44 OPD	270.000.000	Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	44 OPD	270.000.000	
3)	Sub Kegiatan Pendampingan, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	3 Kegiatan	52.000.000	Sub Kegiatan Pendampingan, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	3 Kegiatan	52.000.000	
4)	Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi dan	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi	44 OPD	130.000.000	Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi dan	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan,	44 OPD	130.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	verifikasi penegakan integritas		dan verifikasi penegakan integritas			verifikasi penegakan integritas		asistensi dan verifikasi penegakan integritas			
<b>Jumlah Total</b>					<b>10.126.000.000</b>					<b>10.126.000.000</b>	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Perlunya perumusan dan penyusunan kebijakan pengawasan yang memadai guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik;
2. Perlunya optimalisasi sumber daya dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengawasan intern yang efektif;
3. Perlunya optimalisasi dukungan anggaran dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengawasan.

#### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
NIHIL					

#### 2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
NIHIL					

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### 3.1. Telaahan Terhadap Arah Kebijakan Nasional

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025 tersebut, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui Sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartaba, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Dalam mencapai sasaran pembangunan dan visi misi Presiden maka ditetapkan 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, Presiden telah memberikan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 tersebut, yaitu:

1. Pembangunan SDM;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi;
5. Transformasi Ekonomi.

Sesui dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Inspektorat Kabupaten Banjarnegara dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi Presiden melalui misi ke-8 “Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” yang dijabarkan dengan agenda pembangunan ke-7 “Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”.

Peran APIP yang dikawal oleh BPKP yang merupakan auditor internal adalah mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut indikator capaian yang akan dicapai pada Renstra BPKP tahun 2020-2024 yaitu dengan mengawal program prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola. Indikator yang akan dicapai adalah Indeks Penerapan Manajemen Risiko di kabupaten/kota pada level 3. Untuk itu peran Inspektorat Kabupaten Banjarnegara dalam rangka mencapai indikator tersebut adalah melakukan kegiatan asistensi dan pendampingan dalam rangka mendukung prioritas Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Kabupaten Banjarnegara mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pemantapan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Kabupaten Banjarnegara memiliki peran strategis dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien, terarah dan berkesinambungan.

Untuk memaksimalkan peran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah maka rumusan tujuan Renja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 mengacu pada Renstra Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 yaitu “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Untuk tujuan tersebut diatas, maka sasaran Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah : Meningkatkan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 diperlukan rumusan program dan kegiatan. Rumusan program dan kegiatan dengan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan :
  - 1.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
  - 1.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi :
  - 2.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
  - 2.2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
  - 3.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - 3.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - 3.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  - 3.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - 3.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - 3.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Rumusan Rencana Program dan kegiatan Renja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana tabel 3.1.

**Tabel 3.1.**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024  
dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					Sumber Dana	Jumlah Pagu			
<b>6</b>	<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>					<b>10.126.000.000</b>			<b>12.558.000.000</b>
<b>6.01</b>	<b>Inspektorat</b>					<b>10.126.000.000</b>			<b>12.558.000.000</b>
<b>6.01.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>Inspektorat Kabupaten Banjarnegara</b>	<b>79,99 Nilai</b>	APBD	<b>7.822.000.000</b>		<b>80 Nilai</b>	<b>9.336.000.000</b>
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	100%	APBD	12.000.000		100%	14.000.000
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	100%	APBD	5.785.000.000		100%	6.957.000.000
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	100%	APBD	555.000.000		100%	606.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					Sumber Dana	Jumlah Pagu			
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	100%	APBD	500.000.000		100%	525.000.000
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	100%	APBD	300.000.000		100%	450.000.000
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	100%	APBD	210.000.000		100%	259.000.000
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	100%	APBD	460.000.000		100%	525.000.000
<b>6.01.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Persentase hasil pengawasan sesuai dengan bidang pengawasan yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>Inspektorat Kabupaten Banjarnegara</b>	<b>75%</b>	APBD	<b>1.678.000.000</b>		<b>80%</b>	<b>1.911.000.000</b>
6.01.02.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan internal	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	102 laporan	APBD	1.458.000.000		106 laporan	1.652.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					Sumber Dana	Jumlah Pagu			
6.01.02.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	18 laporan	APBD	220.000.000		20 laporan	259.000.000
<b>6.01.03</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Level Kapabilitas APIP</b>	<b>Inspektorat Kabupaten Banjarnegara</b>	<b>Level 3</b>	APBD	<b>626.000.000</b>		<b>Level 3</b>	<b>1.311.000.000</b>
6.01.03.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan teknis di bidang Pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	3 dokumen	APBD	29.000.000		3 dokumen	34.000.000
6.01.03.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan integritas	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	44 OPD	APBD	597.000.000		44 OPD	1.277.000.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>						<b>10.126.000.000</b>			<b>12.558.000.000</b>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan :

1.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

Sub Kegiatan :

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
- b. Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah;
- c. Reviu Laporan Kinerja;
- d. Reviu Laporan Keuangan;
- e. Pengawasan Desa;
- f. Kerjasama Pengawasan internal;
- g. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, dan tindak lanjut pemeriksaan APIP;

1.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

Sub Kegiatan :

- a. Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah;
- b. Pengawasan dengan tujuan tertentu;

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi :

2.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.

Sub Kegiatan :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang fasilitasi

pengawasan;

2.2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

Sub Kegiatan :

- a. Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah;
- b. Pendampingan asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi;
- c. Pendampingan, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- d. Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

3.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- b. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;

3.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
- b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD;
- c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD;

3.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
- b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;

- c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;

3.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan komponen instalansi listrik/Penerangan bangunan kantor;
- b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- c. Penyediaan bahan logistik kantor;
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;

3.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan mebel;
- b. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
- c. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya;

3.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
- c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;

3.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan

pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;

- c. Pemeliharaan mebel;
- d. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
- e. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya;
- f. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya.

**Tabel 4.1.**

**Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Capaian Program	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif		
					Sumber Dana	Pagu Indikatif	
<b>6</b>	<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>					<b>10.126.000.000</b>	
<b>6.01</b>	<b>Inspektorat</b>					<b>10.126.000.000</b>	
<b>6.01.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>Inspektorat Kabupaten Banjarnegara</b>	<b>79,99 Nilai</b>	APBD II	<b>7.822.000.000</b>	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	100%	APBD II	12.000.000	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	100%	APBD II	5.785.000.000	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	100%	APBD II	555.000.000	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	100%	APBD II	500.000.000	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	100%	APBD II	300.000.000	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Capaian Program	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif		
					Sumber Dana	Pagu Indikatif	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	100%	APBD II	210.000.000	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	100%	APBD II	460.000.000	
<b>6.01.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Persentase hasil pengawasan sesuai dengan bidang pengawasan yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>Inspektorat Kabupaten Banjarnegara</b>	<b>75%</b>	APBD II	<b>1.678.000.000</b>	
6.01.02.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan internal	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	102 laporan	APBD II	1.458.000.000	
6.01.02.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	18 laporan	APBD II	220.000.000	
<b>6.01.03</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>- Level Kapabilitas APIP</b>	<b>Inspektorat Kabupaten Banjarnegara</b>	<b>Level 3</b>	APBD II	<b>626.000.000</b>	
6.01.03.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan teknis di bidang Pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	3 dokumen	APBD II	29.000.000	
6.01.03.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	44 OPD	APBD II	597.000.000	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Capaian Program	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif		
					Sumber Dana	Pagu Indikatif	
		pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan integritas					
<b>JUMLAH TOTAL</b>						<b>10.126.000.000</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2023-2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Kabupaten Banjarnegara setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Inspektorat Kabupaten Banjarnegara menjadi acuan bagi Inspektur Kabupaten Banjarnegara dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal : Maret 2023

INSPEKTUR  
KABUPATEN BANJARNEGARA

**Drs. AGUNG YUSIANTO, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720811 199203 1 002